

**RENCANA KERJA (RENJA)
PERUBAHAN
TAHUN 2022**



**KECAMATAN PLOSO
KABUPATEN JOMBANG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ploso Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ploso merupakan acuan perencanaan program dan kegiatan Kecamatan Ploso yang berpedoman Perubahan RKPD Tahun 2022 guna pencapaian target dan sasaran pembangunan daerah.

Mekanisme dan tahapan penyusunan Renja Kecamatan Ploso sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang Tahun 2022 akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program maupun kegiatan pada tahun 2021. Program dan kegiatan Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang disusun berdasarkan orientasi dalam mewujudkan Visi Bupati terpilih yaitu *“Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing”*, dan untuk mendukung tercapainya Misi Pertama Bupati terpilih yaitu *“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional”*

Harapan kami semoga Perubahan Renja Kecamatan Ploso Tahun 2022 ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah serta mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Ploso, 29 Juni 2022

Camat Ploso



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN 2020	7
2.1 Evaluasi Renja PD samapai dengan Tribulan II Tahun 2020 dan Capaian Sasaran Renstra PD	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah	38
2.4 Penelahaan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	48
BAB III PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	55
3.1 Telahaan Terhadap perubahan Kebijakan Nasional dan Provisinsi	55
3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	58
3.3 Perubahan Program dan Kegiatan	62
BAB IV PENUTUP	74

Lampiran - Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan RKPD Tahun 2021 menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun 2022 yang selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.

Sehubungan hal tersebut, maka disusunlah dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 Perangkat Daerah Kecamatan Ploso dimana dalam proses penyusunannya didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas yang merupakan tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Ploso dilaksanakan untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan dan diformulasikan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2022.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 ini juga berfungsi sebagai alat ukur bagi perencanaan ulang dari seluruh program kegiatan tahunan Kecamatan Ploso, sekaligus untuk memberikan informasi data secara makro bagi rencana kerja tahunan sehingga memudahkan dalam melaksanakan program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, efisien, ramah, inovatif dan akuntabel serta memudahkan evaluasi kinerja.

Hal ini merupakan upaya untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan akan makin mendekat pada tataran clean government dan good governance.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Perubahan Rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Ploso Tahun 2022, didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 8/E
17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 59/D, Tambahan Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 59/D);
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2021;
19. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang tanggal 14 Juni 2022 Nomor : 050/4097/415.42/2020 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 dan Perubahan Renja PD Tahun 2022

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2022 Kecamatan Ploso adalah sebagai berikut :

- ✓ Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Kecamatan Ploso.
- ✓ Menciptakan sinergitas antara prioritas dan sasaran pembangunan Kecamatan Ploso dengan Renstra Kecamatan, RKPD dan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018- 2023;
- ✓ Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Ploso dalam melaksanakan tugasnya dan menentukan prioritas-prioritas di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang mengalami penyesuaian anggaran agar tetap dapat terlaksana dan tidak mengurangi pencapaian target yang telah ditetapkan.

b. Tujuan

Adapun tujuan dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 Kecamatan Ploso adalah sebagai berikut:

- ✓ Sinkronisasi dan Optimalisasi pencapaian target kinerja RPJMD Tahun 2018-2023, khususnya untuk capaian target kinerja tahun 2022.
- ✓ Mewujudkan perencanaan kegiatan yang akuntabel, partisipatif dan bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.
- ✓ Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan Tahun 2022

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah
- 2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Perubahan Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan Perubahan renja OPD Kecamatan Ploso Tahun 2022 mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2018-2023, dengan Visi Kepala Daerah terpilih yakni “Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing”. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi 3 (tiga) Misi dan Misi yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah Misi yang pertama yakni: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional.

Dalam rangka mencapai visi dan misi sesuai tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Ploso pada tahun 2022 melaksanakan 1 urusan pemerintahan unsur kewilayahan bidang urusan Kecamatan, yang dijabarkan dalam 5 Program, 10 kegiatan dan diimplementasikan dalam bentuk 20 Sub Kegiatan serta telah ditetapkan indikator kinerja program dan kegiatan (*outcome*) dan sub kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tabel 2.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Ploso Tahun 2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan an Daerah Kabupaten/ kota	<ul style="list-style-type: none">• Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

		<ul style="list-style-type: none"> • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN • Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD • Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
		<ul style="list-style-type: none"> • Administrasi Umum Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor • Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan • Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan • Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD • Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik • Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan

			<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya • Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
3	Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
4	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
5	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.2
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d. Tahun 2022
Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan Renja)	
					Target Renja 2022		Realisasi Triwulan II (sesuai SPD)			
					K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur Formulasi: Jumlah capaian kinerja seluruh pns di opd dibagi jumlah pegawai kali 100%	200 persen	100 persen	100 persen	94,958,167	50 persen	94,958,167	150 persen	2,815,100,763
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	200 persen	100 persen	100 persen	875,000	50 persen	875,000	150 persen	2,290,500
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	6 dok	3 dok	3 dok	725,000	2 dok	725,000	5 dok	1,540,500

7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	10 dok	5 dok	5 dok	150,000	3 dok	150.000	8 dok	750.000
7.01.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	persen	persen	- persen	-	persen		0 persen	-
7.01.01. 2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi	stel	stel	- stel	-	stel		0 bulan	-
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	200 persen	100 persen	100 persen	2.669.013.576	50 persen	963.114.460	150 persen	2.833.639.556
		Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	200 persen	100 persen	100 persen		50 persen		150 persen	-
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Kec. Ploso yang di fasilitasi	28 bulan	14 bulan	14 bulan	2.597.265.576	7 bulan	927.165.460	21 bulan	2.796.790.556
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	2 dok	1 dok	1 dok	496,200	1 dok	496,200	2 dok	992,400
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 kali	0 kali	12 kali	17,899,500	6 kali	17,899,500	6 kali	89,497,500

7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	200 persen	100 %	100 %	15,520,800	50 %	15,520,800	150 %	49,462,400
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi	12 jenis	6 jenis	6 jenis	1,517,800	6 jenis	1,517,800	12 jenis	3,643,700
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	5 jenis	3 jenis	2 jenis	7,314,000	2 jenis	7,314,000	5 jenis	20,890,800
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	11 bulan	11 bulan	- bulan	4,050,000	bulan	4,050,000	11 bulan	13,950,000
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetak	60 buku	36 buku	24 buku	1,489,000	12 buku	1,489,000	48 buku	5,147,900
		Jumlah pemenuhan barang penggandaan	49780 lembar	41930 lembar	7.850 lembar	740,000	4000 lembar	740,000	45930 lembar	2,960,000
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	2 jenis	1 jenis	1 jenis	4.440.000	1 jenis	1.850.000	2 jenis	3.348.600
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	13 dok	10 dok	3 dok	17,899,500	1 dok	17,899,500	11 dok	89,497,500
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	200 persen	100 persen	100 persen	-	100 persen	-	200 persen	10,000,000

7.01.01. 2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	1 gedung	1 gedung	- gedung	4,250,000	gedung	4,250,000	1 gedung	10,000,000
7 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	26 unit	23 unit	3 unit	-	3 unit	-	26 unit	-
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	200 persen	100 persen	100 persen	44,368,167	50 persen	44,368,167	150 persen	154,168,167
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	24 bulan	12 bulan	12 bulan	11,141,367	6 bulan	11,141,367	18 bulan	34,491,367
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum	9 jenis	5 jenis	4 jenis	33,226,800	4 jenis	33,226,800	9 jenis	119,676,800
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	200 persen	100 persen	100 persen	15,798,500	50 persen	15,798,500	150 persen	55,795,880

7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	2 unit	1 unit	1 unit	11,548,500	1 unit	11,548,500	2 unit	45,795,880
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibayarkan pajaknya	33 unit	11 unit	10 unit		0 unit		11 unit	-
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Ploso yang dipelihara	2 gedung	1 gedung	1 gedung	4.515.000	0 gedung		1 gedung	8.816.000
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	30 unit	15 unit	9 unit	4,250,000	5 unit	4,250,000	15 unit	10,000,000
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Paten Kecamatan	72 nilai	78 nilai	78,50 nilai	1,311,000	0 nilai	1,311,000	72 nilai	3,122,000
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	200 persen	100 persen	100 persen	1,311,000	100 persen	1,311,000	200 persen	3,122,000
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi	200 persen	100 persen	100 persen	1,311,000	100 persen	1,311,000	200 persen	3,122,000
		Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi	200 persen	100 persen	100 persen		100 persen		200 persen	-

7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	200 persen	100 persen	100 persen	2,722,000	100 persen	2,722,000	200 persen	28,194,000
		Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	200 persen	100 persen	100 persen		100 persen		200 persen	-
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeinahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	52 dokumen	26 dokumen	26 dokumen	2,722,000	26 dokumen	2,722,000	52 dokumen	28,194,000
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	52 laporan	26 laporan	26 laporan	2,722,000	26 laporan	2,722,000	52 laporan	28,194,000
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	200 persen	100 persen	100 persen	7,082,000	50 persen	7,082,000	150 persen	19,264,000
		Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	52 lembaga	26 lembaga	26 lembaga		26 lembaga		52 lembaga	-
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	52 dokumen	26 dokumen	26 dokumen	7,082,000	13 dokumen	7,082,000	39 dokumen	19,264,000

		Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	52 lembaga	26 lembaga	26 lembaga		26 lembaga		52 lembaga	-
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa	52 dokumen	26 dokumen	26 dokumen	7,082,000	13 dokumen	10.411.000	39 dokumen	19,264,000
		Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan	26 BUMDes	13 BUMDes	13 BUMDes		13 BUMDes		26 BUMDes	-
		Jumlah TP PKK yang dikoordinasikan	26 TP PKK	13 TP PKK	13 TP PKK		13 TP PKK		26 TP PKK	-
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	200 persen	100 persen	100 persen	1,611,000	50 persen	861,000	150 persen	2,472,000
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	24 laporan	12 laporan	12 laporan	1,611,000	6 laporan	861,000	18 laporan	2,472,000
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	24 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	1,611,000	6 dokumen	861,000	18 dokumen	2,472,000

7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH UMUM	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	200 persen	100 persen	100 persen	-	0 persen	-	100 persen	2,472,000
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100 persen	0 persen	100 persen		50 persen		50 persen	-
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	2 laporan	1 laporan	1 laporan	-	0 laporan	-	1 laporan	2,472,000
		Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	0 dokumen	4 dokumen		2 dokumen		2 dokumen	-
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan	2 keg	1 keg	1 keg	-	0 keg	-	1 keg	2,472,000
7 01 05 2.01 02	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam	4 laporan	0 laporan	4 laporan		2 laporan	-	2 laporan	-
						2.761.218.620		226.726.679		208.815.257

Dilihat dari Tabel 2.1, Evaluasi Triwulan II Tahun 2022, dari 35 indikator sub kegiatan terdapat 9 (sembilan) indikator sub kegiatan yang sudah mencapai target kinerja pada tahun berjalan, yaitu indikator:

1. Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD
2. Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi
3. Jumlah Pemenuhan Bahan Bacaan
4. Jumlah komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi
5. Jumlah Pemenuhan jenis Pelayanan Umum
6. Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara
7. Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi
8. Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang belum simetris dengan target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan karena penyesuaian target/keluaran kegiatan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

➤ Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target 3 dokumen terealisasi 2 dokumen (Renja 2023 dan Perubahan Renstra Kedua 2018-2023) dan 1 dokumen sisanya akan dilaksanakan pada tribulan III (Renja Perubahan 2022).

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target 5 dokumen terealisasi 2 dokumen (LkjIP 2021 dan TB I 2022, TB II 2022) dan 2 dokumen sisanya akan dilaksanakan pada tribulan III dan IV).

➤ **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan target 14 bulan terealisasi 7 bulan (Gaji Januari sd. Juni dan Gaji 13) dan 7 bulan sisanya akan dilaksanakan pada tribulan III dan IV (Gaji Juli sd. Desember 2022, Gaji 14).

➤ **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

a. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Pada sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan target barang cetak 24 buku dan penggandaan 7850 lembar terealisasi cetak 6 buku dan penggandaan 4000 lembar dan sisanya akan dilaksanakan pada tribulan III dan IV.

b. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd

Pada sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd dengan target 3 dokumen terealisasi 1 dokumen (perjalanan dinas camat)

➤ **Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pada sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan target 12 bulan terealisasi 6 bulan (Januari sd. Juni) dan 6 bulan sisanya akan dilaksanakan pada tribulan III dan IV (Juli sd. Desember 2022).

➤ **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

Pada sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan indikator Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan

yang dibayarkan pajaknya target 10 unit belum terealisasi karena belum jatuh tempo dan akan dilaksanakan pada tribulan III dan IV.

b. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

c. Pada sub kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya target 1 gedung belum terealisasi karena untuk pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya akan dilaksanakan pada tribulan III

d. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pada sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan target 9 unit terealisasi 5 unit

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

➤ Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Pada sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan indikator :

Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa dengan target 26 dokumen terealisasi 13 dokumen dan sisanya akan dilaksanakan pada tribulan III dan IV.

Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan dengan target 13 BUMDes terealisasi 13 BUMDes

Jumlah TP PKK yang dikoordinasikan dengan target 13 TP PKK terealisasi 13 TP PKK

3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

➤ Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pada sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan target 12 kegiatan terealisasi 6 kegiatan (Januari sd. Juni) dan 6 sisanya akan dilaksanakan pada tribulan III dan IV (Juli sd. Desember 2022).

4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

➤ Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Pada sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan target 26 laporan terealisasi 13 laporan LRA 2021 dan LRA Semester 1

Analisis kinerja anggaran Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tribulan II adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

➤ Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Tahun 2022 dianggarkan Rp. 815.500 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp. 815.500 atau tercapai sebesar 76,8%.
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada Tahun 2022 dianggarkan Rp. 600.000,00 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp. 150.000,00 atau tercapai sebesar 75%.

➤ **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Tahun 2022 dianggarkan Rp. 2.462,893,00 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp. 314466,00 atau tercapai sebesar 35,7%.

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD pada Tahun 2022 dianggarkan Rp. 490.000,00 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp 490.000,00 atau tercapai sebesar 100%.

c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan pada Tahun 2022 dianggarkan Rp. 71.598.000,00 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp 35.499.000 atau tercapai sebesar 50%.

➤ **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor pada Tahun 2022 dianggarkan Rp. 2,125,900 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp. 608.000,00 atau tercapai sebesar 50%.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Tahun 2022 dianggarkan Rp. 13,576,800 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp 5.228.000,00 atau tercapai 50,1%.

c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Tahun 2022 dianggarkan Rp. 3.658.000 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp. 1.178,250,00 atau tercapai sebesar 50,7%.

c. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Tahun 2022 dianggarkan Rp. 3.658.000 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp. 1.178,250,00 atau tercapai sebesar 16,38%.

d. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd

Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd pada Tahun 2022 dianggarkan Rp. 2.460.000,00 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp. 2.460.000,00 atau tercapai sebesar 100%

➤ **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Tahun 2022 dianggarkan Rp. 5,750.000,00 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp. 4,750,000,00 atau tercapai sebesar 90%

➤ **Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Tahun 2022 dianggarkan Rp. 23.350.000,00 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp. 14.010.000 atau tercapai sebesar 50,3%.

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Tahun 2022 dianggarkan Rp. 86.450.000,00 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp. 43.240.000,00 atau tercapai sebesar 50 %.

➤ **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan pada Tahun 2022 dianggarkan Rp. 34.247.379,00 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp. 17.500.000,00 atau tercapai sebesar 50 %.
2. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada tahun 2022 dianggarkan Rp. - belum terealisasi karena pemeliharaan gedung akan dilaksanakan pada tribulan III.
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Tahun 2022 dianggarkan Rp. - dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp. - atau tercapai sebesar 0 %.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

➤ Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- a. Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan pada Tahun 2022 dianggarkan Rp. 1.811.000,00 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp. 1.411.000,00 atau tercapai sebesar 95%.

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

➤ Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa pada Tahun 2021 dianggarkan Rp. 12.182.000,00 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp. 10.411.000,00 atau tercapai sebesar 68,4%.

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

➤ Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia pada

Tahun 2022 dianggarkan Rp. 3.720.000,00 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp.1.860.000,00 atau tercapai sebesar 50%.

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

➤ Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa pada Tahun 2022 dianggarkan Rp. 25.472.000,00 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp. 6.200.000,00 atau tercapai sebesar 50%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kecamatan Ploso merupakan lembaga pemerintah yang langsung berhubungan dengan masyarakat, oleh sebab itu maka peningkatan pelayanan Kecamatan terhadap masyarakat Kecamatan Ploso, baik yang terkait dengan pelayanan administrasi persuratan, fasilitasi kegiatan sosial ekonomi, pembangunan sarana prasarana maupun pemberdayaan masyarakat dalam arti yang luas adalah merupakan tugas utama.

Secara umum, dasar penyelenggaraan pelayanan publik Kecamatan Ploso adalah Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat. Maksud dilimpahkannya sebagian wewenang Bupati kepada Camat adalah untuk mempertegas dan memberi kepastian hukum bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat sebagai Perangkat Daerah. Adapun tujuan dilimpahkannya sebagian wewenang Bupati kepada Camat adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Camat.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Ploso menyelenggarakan 1 (satu) Urusan yaitu Urusan Kewilayahan, dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut :

1. Capaian Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Program

Sampai dengan periode tribulan II tahun 2022, Kecamatan Ploso telah menganggarkan penyusunan rencana kerja sejumlah 2 dokumen (Renja 2023 dan Perubahan Renstra 2018-2023) , laporan capaian kinerja sebanyak 3 dokumen (LkjIP 2021 dan laporan

capaian kinerja tribulan 1 dan 2), dan laporan keuangan sebanyak 1 dokumen (Laporan Keuangan 2021).

2. Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan

Terdapat beberapa kegiatan dalam upaya mencapai peningkatan pelayanan kecamatan yaitu terselenggaranya Musrenbang kecamatan, terlaksananya kegiatan pelayanan PATEN, dilaksanakannya kegiatan pembinaan administrasi desa oleh Tim Pembina Kecamatan, pembinaan PKK sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 bahwa analisis kinerja pelayanan SKPD menggunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, atau indikator-indikator lainnya yang sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Dalam hal ini Kecamatan Ploso menggunakan indikator yang mencerminkan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi. Evaluasi capaian kinerja pelayanan disajikan dengan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ploso
Kabupaten Jombang

NO	Indikator	SPM/St andar Nasiona l	IKK	Realisasi Renstra PD			Target Renstra PD		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	14
1	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan Ploso Minimal Baik			70.00	72,25	N/A	N/A	N/A	
1.1	Jumlah pemenuhan komponen sinergitas kinerja bidang pemerintahan umum dan desa			22	22	N/A	N/A	N/A	
1.2	Jumlah pemenuhan komponen sinergitas kinerja bidang ketentraman dan ketertiban umum			8	8	N/A	N/A	N/A	
1.3	Jumlah pemenuhan komponen sinergitas kinerja bidang pemberdayaan masyarakat dan desa			11	11	N/A	N/A	N/A	
1.4	Jumlah pemenuhan komponen sinergitas kinerja bidang sosial budaya			16	16	N/A	N/A	N/A	
2	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran			100	100	N/A	N/A	N/A	
2.1	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran			19	18	N/A	N/A	N/A	
3	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan			100	100	N/A	N/A	N/A	
3.1	Luas bangunan yang direhab			-	N/A	N/A	N/A	N/A	
3.2	Luas gedung kantor/ bangunan pendukungnya yang terbangun			-	N/A	N/A	N/A	N/A	

3.3	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor			-	N/A	N/A	N/A	N/A	
3.4	Luas gedung kantor/bangunan pendukungnya yang dipelihara			-	N/A	N/A	N/A	N/A	
3.5	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara			21	22	N/A	N/A	N/A	
3.6	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara			1	1	N/A	N/A	N/A	
3.7	Jumlah pengadaan pakaian olahraga			22		N/A	N/A	N/A	
4	Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan yang tersusun tepat waktu			100	100	N/A	N/A	N/A	
4.1	Jumlah dokumen Renstra Kec. Ploso yang tersusun			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
4.2	Jumlah dokumen Renja Kec. Ploso yang tersusun			2	2	N/A	N/A	N/A	
4.3	Jumlah dokumen LKjIP Kec. Ploso yang tersusun			2	1	N/A	N/A	N/A	
4.4	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Kec. Ploso yang tersusun			2	2	N/A	N/A	N/A	
1.	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	-	-	N/A	N/A	100,12%	100%	N/A	
1.1	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	-	-	N/A	N/A	100%	100%	N/A	
1.1.1	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	-	-	N/A	N/A	3 dok	3 dok	N/A	
1.1.2	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	-	-	N/A	N/A	5 laporan	5 laporan	N/A	
1.2	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	-	-	N/A	N/A	100%	100%	N/A	
	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	-	-	N/A	N/A	100%	100%	N/A	
1.2.1	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Kec. Ploso	-	-	N/A	N/A	14 bulan	14 bulan	N/A	

	yang di fasilitasi								
1.2.2	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	-	-	N/A	N/A	1 dok	1 dok	N/A	
1.2.3	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	-	-	N/A	N/A	N/A	12 kali	N/A	
1.3	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	-	-	N/A	N/A	100%	100%	N/A	
1.3.1	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi	-	-	N/A	N/A	6 jenis	6 jenis	N/A	
1.3.2	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	-	-	N/A	N/A	3 jenis	2 jenis	N/A	
1.3.3	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	-	-	N/A	N/A	11 bulan	11 bulan	N/A	
1.3.4	Jumlah pemenuhan barang cetak	-	-	N/A	N/A	36 buku	24 buku	N/A	
1.3.5	Jumlah pemenuhan barang penggandaan	-	-	N/A	N/A	41930 lembar	7850 lembar	N/A	
1.3.6	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	-	-	N/A	N/A	1 jenis	1 jenis	N/A	
1.3.7	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	-	-	N/A	N/A	10 Laporan	3 laporan	N/A	
1.4	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	-	-	N/A	N/A	100%	100%	N/A	
1.4.1	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
1.4.2	Jumlah Pengadaan sarana Gedung Kantor	-	-	N/A	N/A	23 unit	5 unit	N/A	
1.5	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kec. Ploso	-	-	N/A	N/A	100%	100%	N/A	
1.5.1	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi	-	-	N/A	N/A	N/A	16	N/A	
1.6	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	-	-	N/A	N/A	100%	100%	N/A	
1.6.2	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	-	-	N/A	N/A	12 bulan	12 bulan	N/A	

1.6.3	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum	-	-	N/A	N/A	5 jenis	3 jenis	N/A	
1.7	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	-	-	N/A	N/A	100%	100%	N/A	
1.7.1	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	-	-	N/A	N/A	1 unit	1 unit	N/A	
1.7.2	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya	-	-	N/A	N/A	23 unit	10 unit	N/A	
1.7.3	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Ploso yang dipelihara	-	-	N/A	N/A	1 gedung	N/A	N/A	
1.7.4	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	-	-	N/A	N/A	21 unit	40 unit	N/A	
2	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	-	-	N/A	N/A	100%	100%	N/A	
2.1	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	-	-	N/A	N/A	1 laporan	1 laporan	N/A	
2.1.1	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan	-	-	N/A	N/A	1 dokumen	1 dokumen	N/A	
3	Nilai Paten Kecamatan	-	-	N/A	N/A	85,05	85,1	N/A	
3.1	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	-	-	N/A	N/A	100%	100%	N/A	
3.1.1	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk	-	-	N/A	N/A	100%	100%	N/A	
3.1.2	Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi	-	-	N/A	N/A	100%	100%	N/A	
4	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	-	-	N/A	N/A	100%	100%	N/A	
	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	-	-	N/A	N/A	100%	100%	N/A	
4.1	1. Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	-	-	N/A	N/A	26 dokumen	26 dokumen	N/A	
4.2	2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibi	-	-	N/A	N/A	26 lembaga	26 lembaga	N/A	
4.1.1	1. Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa	-	-	N/A	N/A	26 dokumen	26 dokumen	N/A	

							n		
4.2.1	2. Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan	-	-	N/A	N/A	13 BUMDes	13 BUMDes	N/A	
4.2.2	3. Jumlah TP PKK yang dikoordinasikan	-	-	N/A	N/A	13 TP-PKK	13 TP-PKK	N/A	
5	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	-	-	N/A	N/A	100%	100%	N/A	
	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	-	-	N/A	N/A	100%	100%	N/A	
5.1	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	-	-	N/A	N/A	26 dokumen	26 dokumen	N/A	
5.1.1	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	-	-	N/A	N/A	26 laporan	26 laporan	N/A	
6	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	-	-	N/A	N/A	100%	100%	N/A	
6.1	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	-	-	N/A	N/A	12 laporan	12 laporan	N/A	
6.1.1	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	-	-	N/A	N/A	12 kegiatan	12 kegiatan	N/A	
1.	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	
1.1	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	
1.1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dokumen	
1.1.2	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	5 dokumen	
1.2	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	

	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	
1.2.1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	19 orang/bulan	
1.2.2	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Laporan	
1.2.3	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	12 dokumen	
1.3	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	
1.3.1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan bangunan kantor yang terfasilitasi	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	6 paket	
1.3.2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	21 paket	
1.3.3	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	1 paket	
1.3.4	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	2 paket	
1.3.5	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	
1.3.6	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	4 laporan	
1.3.7	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	
1.4	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
1.4.1	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	2 unit	
1.4.2	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kec. Ploso	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

1.5	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
1.5.1	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	
1.6	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	24 laporan	
1.6.2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	25 laporan	
1.6.3	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	
1.7	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	10 unit	
1.7.1	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	3 unit	
1.7.2	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	16 unit	
1.7.3	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	
1.7.4	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	
2	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	1 laporan	
2.1	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	4 dokumen	
2.1.1	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	100 orang	
3	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	4 laporan	
3.1	Nilai Paten Kecamatan	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	85,2	
3.1.1	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	

3.1.2	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	
4	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	
	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	26 lembaga	
4.1	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	26 lembaga	
4.2	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	4 laporan	
4.1.1	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	
4.2.1	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	
4.2.2	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	26 dokumen	
5	Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	26 dokumen	
	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	
5.1	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	12 kegiatan	
5.1.1	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	12 laporan	

2.3. Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

1. Tingkat Kinerja Pelayanan OPD

Tingkat Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Ploso dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, adalah:

- a. Terbatasnya jumlah dan kualitas personil di Kecamatan Ploso sehingga berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD kecamatan Ploso.
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kerja.
- c. Belum terakomodirnya seluruh usulan – usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Ploso yang disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Jombang.
- d. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Ploso sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Ploso terkendala dengan cepatnya usia fisik, dikarenakan sebagian besar jalan di wilayah Kecamatan Ploso merupakan jalan utama antar Kabupaten dengan lalu lintas cukup padat menyebabkan jalan sering dilalui kendaraan – kendaraan besar dengan muatan banyak.

Keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ploso pada tahun 2022 adalah merupakan upaya dalam mencapai target dan sasaran pembangunan dimana hal

tersebut telah ditetapkan di dalam Visi dan Misi RPJMD tahun 2018-2023 yakni untuk menghasilkan produk-produk perencanaan yang berkualitas dan akuntabel, dalam artian bahwa perencanaan pembangunan dilakukan dengan terukur dan tepat sasaran, baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga memudahkan didalam proses monitoring, evaluasi maupun pengendalian serta nantinya diharapkan dapat memberikan arah dan kebijakan dalam mengatasi permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terjadi pada tahun berjalan.

3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah adalah:
 - a. Terhambatnya pemenuhan target dan sasaran yang telah ditetapkan didalam RPJMD Kab. Jombang Tahun 2018-2023
 - b. Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan yang berdampak pada kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat dan tingkat kesejahteraan
 - c. Anggaran dana yang tertuang dalam DPA Kecamatan Ploso belum dapat mengakomodir seluruh kebutuhan sehingga berdampak pada pencapaian prioritas pembangunan daerah keempat yang tertuang dalam dokumen P-RKPD Kab. Jombang tahun 2022 yakni peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.

Penyusunan Rencana Kerja OPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan Kabupaten Jombang sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Kecamatan Ploso sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023.

Visi Kabupaten Jombang:

Visi dan misi merupakan gambaran otentik Kabupaten Jombang dalam 5 (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2018-2023. Gambaran Nyata tentang visi dan misi dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran merujuk pada arah kebijakan RPJPD Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025. Tujuan dan sasaran juga mengalami pengayaan mempertimbangkan berbagai isu strategis dan kebijakan nasional. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan pembangunan dan isu strategis di Kabupaten Jombang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Pemerintah Kabupaten Jombang tahun 2018-2023 yang hendak dicapai adalah: “Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing”.

Misi Kabupaten Jombang:

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan dijabarkan dalam 3 (tiga) Misi dan Sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Ploso, maka Misi yang diemban dan harus diwujudkan adalah Misi ke 1 yakni: **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional**, dengan penjelasan: Misi ini dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Pencapaian visi dan misi Kabupaten Jombang yang telah dibahas diatas tidak terlepas dari Program Nasional seperti SPM maupun Program Internasional yaitu SDGs dan akan dibahas selanjutnya. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap Program Nasional Program Nasional yang mempengaruhi dalam pencapaian visi dan misi Kabupaten Jombang adalah Program SPM yang telah di atur dalam Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah pada batas waktu yang ditentukan. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan yang disesuaikan dengan perkembangan, kebutuhan, prioritas, dan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah dalam bidang yang bersangkutan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibagi dalam bidang urusan, yaitu :

1. Perumahan Rakyat
2. Pemerintahan Dalam Negeri
3. Sosial
4. Kesehatan
5. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6. Lingkungan Hidup
7. Keluarga Berencana dan Sejahtera
8. Pendidikan
9. Pekerjaan Umum
10. Ketahanan Pangan
11. Kesenian
12. Komunikasi dan Informasi

Telahaan visi dan misi Kabupaten Jombang dalam hal ini Kecamatan Ploso, Misi 1: **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan**

Bersih dan Profesional, mendukung SPM di bidang Pemerintahan Dalam Negeri. Pencapaian visi dan misi Kabupaten Jombang tidak terlepas dari Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD sesuai dengan bidang urusannya. Oleh karena itu dengan melaksanakan tugas dan fungsi yang mengacu pada cakupan dan kualitas pelayanan dasar maka visi dan misi Kabupaten akan tercapai.

Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap Program Internasional SDGs (Sustainable Development Goals) adalah sebuah dokumen yang akan menjadi acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia. SDGs (Sustainable Development Goals) merupakan kelanjutan dari apa yang sudah dibangun MDGs (Millenium Development Goals). Ini merupakan hasil pertemuan pada 25-27 September 2015 di markas besar PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), New York, Amerika Serikat yaitu Sustainable Development Summit, yang di dalamnya merupakan kegiatan seremoni pengesahan dokumen SDGs (Sustainable Development Goals) yang dihadiri perwakilan dari 193 negara.

Adapun tujuan SDGs adalah:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.

Target utama SDGs adalah mengentaskan kemiskinan. Tapi, Indonesia akan menggunakan tiga indikator terkait dengan dokumen SDGs, yaitu pembangunan manusia atau human development yang meliputi pendidikan dan kesehatan, lingkungan atau social economic development dan lingkungan yang besar atau

environmental development berupa ketersediaan kualitas lingkungan dan sumber daya alam yang baik.

SDGs memiliki 5 pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut, disusunlah 17 Tujuan Global berikut ini :

1. Tanpa Kemiskinan, Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.
2. Tanpa Kelaparan, Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.
3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.
4. Pendidikan Berkualitas Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
5. Kesetaraan Gender Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.
6. Air Bersih dan Sanitasi Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.
7. Energi Bersih dan Terjangkau Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.
8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

10. Mengurangi Kesenjangan Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.
11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan berkelanjutan.
12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.
13. Aksi Terhadap Iklim Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Kehidupan Bawah Laut, Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.
15. Kehidupan di Darat Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Telahaan visi dan misi Kabupaten Jombang yang terkait dengan OPD Kecamatan Ploso memberikan gambaran peran serta keterlibatan secara langsung terhadap tujuan global SDGs yaitu

sebagai berikut: Misi 1: **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional** mendukung tujuan global SDGs yang ke-16 yakni: Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.

Program/Kegiatan yang dilaksanakan di setiap OPD di Kabupaten Jombang dalam hal ini Kecamatan Ploso mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah yang berkesinambungan dengan program SDGs.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.

Tantangan :

- a. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras sehingga mempengaruhi kelancaran proses pelayanan;
- b. Jaringan Internet yang masih terkadang crowded berpengaruh pada terhambatnya proses pelayanan kepada masyarakat;
- c. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan;
- d. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang berkualitas terkait dengan peningkatan pelayanan publik;
- e. Perubahan KTP SIAK menjadi e- KTP di Kecamatan Ploso saat ini belum bisa maksimal dikarenakan perangkat perekaman e - KTP terkadang tidak dapat dioperasikan yakni alat perekaman sidik jari dan iris mata terkadang trouble sehingga pemohon disarankan untuk perekaman di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Jombang;
- f. Pemohon KK dan e-KTP di wilayah Kecamatan Ploso cukup banyak, sedangkan petugas operator hanya 1 (satu) orang yang ditangani meliputi cetak KK, Pengantar KK dan e-KTP (Barcode)

dan perangkat scanner hanya 1 (satu) yang bisa dioperasikan sehingga pelayanan kurang maksimal .

Peluang :

- a. Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada;
- b. Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang pemeliharaan secara berkala;
- c. Mengikutsertakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan;
- d. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan tunggu bagi pemohon melalui anggaran operasional Kecamatan ;
- e. Untuk memperkuat kapasitas dan menjaga motivasi kerja pegawai diperlukan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan, sebagai upaya merespon tuntutan eksternal untuk selalu memperbaiki kinerja serta optimalisasi dukungan dari atasan, sistem pengendalian intern dan pengawasan melekat.

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Ploso terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah:
 - a. Perencanaan Pembangunan
 - Dalam Perencanaan Pembangunan pada Tahun Anggaran 2022, telah dilaksanakan melalui kegiatan Musrenbangcam, tetapi masih terdapat beberapa usulan yang belum

terrealisasi, dikarenakan terbatasnya anggaran pada APBD Kab. Jombang.

- Diperlukan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dengan melibatkan stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan rencana strategis tahun 2018-2023 sehingga diperlukan output yang lebih aspiratif.
- Ketersediaan data tahunan yang valid dan mutakhir sebagai modal database dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

b. Keamanan dan Ketertiban

Pada Tahun Anggaran 2020, OPD Kecamatan Ploso dalam bidang keamanan dan ketertiban melakukan penertiban, pembinaan, pemantauan sehingga wilayah Kecamatan Ploso dalam kondisi aman, nyaman, tertib dan kondusif dan untuk meningkatkan kinerja perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana pendukung.

c. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Pada Tahun Anggaran 2022, telah berhasil dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Ploso melalui 1 (empat) Program rutin dan 5 program Kecamatan dengan 5 kegiatan dan 6 sub kegiatan.

d. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Diperlukan pembinaan lebih intensif dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa agar potensi yang ada dapat lebih berkembang serta dapat bersaing di era globalisasi diantaranya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), perdagangan transnasional, serta perkembangan teknologi informasi.

2.4. Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai bagian dari upaya untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, maka diperlukan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam sistem, dalam hal ini terutama adalah partisipasi masyarakat pada proses penyusunan perencanaan kerja. Beberapa *stakeholder* yang terlibat dalam memberikan masukan terhadap penyusunan perencanaan antara lain lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat maupun OPD Kabupaten.

Pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan kerja berfungsi untuk menyerap aspirasi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat serta program dan kegiatan yang diperlukan untuk diakomodir oleh Kecamatan Ploso sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya.

Rancangan rencana kerja Kecamatan Ploso didiskusikan dalam pembahasan Forum SKPD tingkat Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Usulan program dan kegiatan masyarakat telah diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ploso dengan mempertimbangkan aspek-aspek kajian kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan jumlah anggaran, serta tantangan yang dihadapi dan peluang yang dapat dioptimalkan.

Dari proses penyelarasan beberapa isu penting yang diekspose dalam dokumen ini dengan usulan program dan kegiatan masyarakat, telah dituangkan beberapa kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 yang berkaitan dengan :

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana strategis yang bersifat aspiratif, maka akan diadakan *Focus Group Discussion* (FGD) dalam penyusunan Renstra.
- b. Pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan adalah meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan program di seluruh Desa.
- c. Ketersediaan data tahunan yang valid dan mutakhir sebagai bahan dalam penyusunan monografi kecamatan, dengan mengoptimalkan peran perangkat desa yang dinamis sebagai petugas *collecting data*,
- d. Pemerataan pembangunan fisik untuk mereduksi ketimpangan perkembangan pembangunan antar wilayah sekaligus memberdayakan sumber daya lokal melalui kegiatan padat karya.

Secara umum, usulan program dan kegiatan masyarakat telah selaras dengan kebutuhan sebagaimana telah direncanakan oleh Kecamatan Ploso sehingga kondisi sinergis ini dapat dengan lancar dituangkan dalam dokumen perencanaan dan diharapkan dapat berhasil dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan pemilahan dan pembahasan pada Forum SKPD dan berpedoman pada Perubahan RKPD Kab. Jombang Tahun 2022, maka ditetapkan Perubahan Renja Kecamatan Ploso Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

TABEL 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PERUBAHAN RENJA KECAMATAN PLOSO
TAHUN 2022

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kerangka Pendanaan Tahun 2022
1	2	3	4	5
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur Formulasi: Jumlah capaian kinerja seluruh pns di opd dibagi jumlah pegawai kali 100%	100 persen	2.462.893.941
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100 persen	1.415.500
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	3 dok	815.500
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	5 dok	600.000
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100 persen	1.231.446.970,5
7.01.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi	17 orang	5.100.000
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100 persen	2.462.893.941
		Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai	100 persen	

		aturan			
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Kec. Ploso yang di fasilitasi	14	bulan	2.159.919,756
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	1	dok	496.200
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12	kali	71.598.000
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	%	34.939.300
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi	3	jenis	2.125.900
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	4	jenis	14.574.500
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	12	bulan	9.900.000
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetak	12	buku	3.658.900
		Jumlah pemenuhan barang penggandaan	7587	lembar	
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	1	jenis	2,220.000
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3	dok	2.460.000
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100	persen	8.011.000
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	0	gedung	-
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	1	unit	8.011.000

7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	persen	115.650.000
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	12	bulan	29.200.000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum	4	jenis	86.450.000
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	persen	119.988.779
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	1	unit	34.247.379
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibayarkan pajaknya	13	unit	
5 2 03 04 01 0004	Pemeliharaan Pagar pembatas kantor kecamatan dan tanah Urig	Jumlah Pagar pembatas kantor kecamatan dan tanah Urig	1	Unit	79.991.400
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	24	unit	5.750.000
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Paten Kecamatan	88,45	nilai	1.811.00
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100	persen	1.811.00
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pengajuan pelayanan Admindex yang diverifikasi	100	persen	1.811.00
		Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi	100	persen	

7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100	persen	25.472.000
		Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100	persen	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeinahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	26	dokumen	25.472.000
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	26	laporan	25.472.000
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100	persen	123.982.400
		Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	26	lembaga	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	26	dokumen	123.982.400
		Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	26	lembaga	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa	26	dokumen	123.982.400
		Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan	13	BUMDes	
		Jumlah TP PKK yang dikoordinasikan	13	TP PKK	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100	persen	1.611.000

7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	12	laporan	1.611.000
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	12	dokumen	1.611.000
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH UMUM	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100	persen	25.472.000
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100	persen	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	1	laporan	25.472.000
		Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4	dokumen	
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan	-	keg	-
7 01 05 2.01 02	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam	4	laporan	1500.000
					2.659.844.169

BAB III

PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional, Propinsi dan Kabupaten

3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi, dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020 – 2024 adalah:

“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut adalah melalui 7 (Tujuh) Misi Pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, mahu dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk mewujudkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yakni:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Selanjutnya untuk Prioritas Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam RKP Tahun 2022 bertema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” adalah meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

3.1.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Kebijakan pembangunan pada skala regional yang direncanakan oleh Provinsi Jawa Timur sebagaimana RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, mengambil tema “Pemulihan Ekonomi Dan Reformasi Struktural Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah Di Era Industri Perdagangan Berbasis Agro.”.

Untuk mewujudkan tema tersebut maka ditetapkan prioritas pembangunan tahun 2020 adalah:

1. Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata.
2. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur.
3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan.
4. Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal
5. Peningkatan Kemandirian Pangan, dan Pengelolaan Sumber Daya Energi.
6. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur

3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Jombang, dan Kecamatan Ploso melaksanakan 1 (satu) Urusan yaitu Kewilayahan, maka program kegiatan di Kecamatan Ploso mendukung Prioritas Pembangunan Daerah yang ke-4, yakni: **Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, dengan sasaran meliputi:**

- a. Terpeliharanya keamanan dan ketertiban umum;
- b. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
- c. Terwujudnya pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Terwujudnya kerukunan didalam kehidupan sosial dan beragama;

Guna mendukung Prioritas Pembangunan Daerah tersebut maka dalam menjalankan tugasnya ditetapkan tujuan dan sasaran dari Rencana Kerja OPD, dimana tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu serta untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Ploso yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai adalah: “Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi” dan “Meningkatkan Kualitas Layanan Publik”

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Sasaran kinerja yang telah direncanakan disusun indikator kinerja dan formulasi perhitungannya. Perhitungan formulasi tersebut adalah sebagai berikut

Tabel 3.1
Tujuan,Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi, dan Program Renstra Kecamatan Ploso Tahun 2018-2023

TUJUAN			SASARAN			ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM
URAIAN	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI			
Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokras	Indeks Reformasi Birokrasi	76	Meningkatnya Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai Evaluasi AKIP tahun n	<p>1. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mewujudkan pelayanan prima</p> <p>2. Meningkatkan jangkauan informasi potensi dan informasi prosedur pelayanan yang diterima masyarakat</p>	<p>1. Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dibidang IPTEK dan IMTAQ</p> <p>2. Optimalisasi Penyajian data dan informasi</p>	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	8,10	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Ploso	IKM Kecamatan Ploso tahun n	Meningkatkan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat terkait pelayanan perijinan dan non perijinan	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
				IPP Kecamatan	IPP Kecamatan Ploso tahun n	Meningkatkan kegiatan	Pengembangan Kegiatan seni,	Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

				Ploso		seni,budaya, keagamaan, wawasan kebangsaan di masyarakat	budaya,dan keagamaan yang berorientasi pada wawasan kebangsaan	Umum
				Persentase laporan pelanggaran Perda / Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	Jumlah laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait -----x 100% Jumlah laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke instansi terkait	1. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban di lingkungan Kecamatan 2. Meningkatkan pembinaan kerukunan bermasyarakat	Sosialisasi dan optimalisasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tepat waktu	Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tepat waktu -----x 100% Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes	Pengembangan produk Lokal masyarakat Sesuai potensi Kecamatan	Pengembangan potensi Kecamatan berbasis produk unggulan di tiap Desa (One Village One Product)	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
				Persentase evaluasi RAPERDES APBDesa /Perubahan	Jumlah evaluasi Raperdes APBDes / Perubahan APBDes tepat waktu	Optimalisasi partisipasi Masyarakat dalam Proses perencanaan dan	Perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Kecamatan yang partisipatif	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

				APBDesa tepat waktu	-----x 100% Jumlah evaluasi Raperdes APBDes / Perubahan APBDes	penyelenggaraan pembangunan Kecamatan		
--	--	--	--	------------------------	--	---	--	--

3.3 Perubahan Program dan Kegiatan

Secara umum terdapat perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan di Tahun 2022, akan tetapi sebagai bagian dari upaya Kecamatan Ploso dalam mencapai target kinerja jangka menengah, upaya penanganan Covid-19, pencapaian SDGs, pengentasan kemiskinan, pencapaian SPM, pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh, pendayagunaan potensi ekonomi daerah khususnya yang berbasis agribisnis, serta hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II dilaksanakan perubahan sub kegiatan, indikator dan target pada beberapa kegiatan.

Adapun rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Renja 2022, adalah:

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2022

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2022				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja PD 2022		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan		
					Target Renja 2022		Realisasi Triwulan II (sesuai SPD)		K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)		K	Rp. (.000)
					K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10-6)	13=(11-7)	14		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur Formulasi: Jumlah capaian kinerja seluruh pns di opd dibagi jumlah pegawai kali 100%	200 persen	100 persen	100 persen	2.761.218.620	50 persen	123.446.970,5	100 persen	2.659.844.169	- persen	10.150.766			
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	200 persen	100 persen	100 persen	1.415.500	50 persen	635.000	100 persen	1.415.500	- persen	-			
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	6 dok	3 dok	3 dok	815.500	2 dok	360.000	3 dok	815.500	- dok	-			

7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	10 dok	5 dok	5 dok	600.000	3 dok	275.000	5 dok	600.000	- dok	-	
7.01.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	persen	persen	- persen	-	persen		100 persen	4.800.000	100 persen	4.800.000	
7.01.0 1.2.05. 02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi	stel	stel	- stel	-	stel		17 stel	5.100.000	17 stel	5.100.000	Penambahan anggaran 17 stel pakaian khaki (17 orang pegawai)
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	200 persen	100 persen	100 persen	2.462.893.941	50 persen	1.150.211.892	100 persen	2.159.919.756	- persen		
		Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	200 persen	100 persen	100 persen		50 persen		100 persen		- persen	-	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Kec. Ploso yang di fasilitasi	28 bulan	14 bulan	14 bulan	2.597.265.576	7 bulan	927.165.460	14 bulan	2.113.451.726	- bulan	10.150.766	Gaji berkurang sebesar Rp 302.974.785 dan TPP bertambah Rp 20.704.769

7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	2 dok	1 dok	1 dok	496.000	1 dok	496.000	1 dok	496.000	- dok	-	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 kali	0 kali	12 kali	71.598.000	6 kali	17.899.500	12 kali	71.598.000	- kali	-	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	200 persen	100 %	100 %	22.436.800	50 %	9.800.000	100 %	23.474.800	- %	1.038.000	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi	12 jenis	6 jenis	6 jenis	2.125.900	6 jenis	500.00	6 jenis	2.125.900	- jenis	-	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	5 jenis	3 jenis	2 jenis	14.574.500	2 jenis	4.184.600	2 jenis	14.574.500	- jenis	998.500.000	Penambahan anggaran ATK dan alat kbersihan sebesar Rp. 998.500.000
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	11 bulan	11 bulan	- bulan	9.900.000	bulan	1200.000	0 bulan	9.900.000	- bulan	-	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetak	60 buku	36 buku	24 buku	3.658.900	12 buku	500.000	24 buku	3.658.900	- buku	-	

		Jumlah pemenuhan barang pengadaan	### # lembar	41930 lembar	7.850 lembar		4000 lembar		7850 lembar		- lembar	-	
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	2 jenis	1 jenis	1 jenis	2.220.000	1 jenis	5.55.000	1 jenis	2.220.000	- jenis	-	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	13 dok	10 dok	3 dok	2.460.000	1 dok	410.000	3 dok	2.460.000	- dok	954.000	Penambahan anggaran untuk belanja perjalanan biasa (SPPD Luar Daerah) dari anggaran
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	200 persen	100 persen	100 persen	8.011.000	100 persen	8.011.000	100 persen	8.011.000	- persen	8.011.000	
7.01.0 1.2.07. 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	1 gedung	1 gedung	- gedung	-	gedung	-	0 gedung	-	- gedung	-	
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	1 unit	1 unit	1 unit	8.011.000	3 unit	8.011.000	1 unit	8.011.000	1 unit	8.011.000	Usulan Penambahan Anggaran untuk sarana dan prasarana pendukung PATEN, 1 unit Komputer Destop core i3

7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	200 persen	100 pers en	100 pers en	109.800.00 0	50 perse n	27.072.580	100 per se n	115.650.000	- perse n	- 6.288.000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	24 bulan	12 bula n	12 bula n	23.350.000	6 bula n	8.022.580	12 bul an	29.200.000	- bula n	14.150.000	Penambahan Anggaran belanja listrik dan telepon 14.150.000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum	9 jenis	5 jenis	4 jenis	86.450.000	4 jenis	19.050.000	3 jen is	86.450.000	- 1 jenis	- 900.000	Pengurangan anggaran dan kinerja pada Premi Asuransi BPJS kesehatan dan tenaga kerjaan Honorer sebesar Rp. 900.000,
7 01 01 2.09	Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	200 persen	100 pers en	100 pers en	38.025.0 00	50 perse n	15.960.000	100 per se n	130.925.00 0	- perse n	92.900.000	

7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	2 unit	1 unit	1 unit	34.247.379	1 unit	3.505.000	1 unit	34.247.379	- unit	-	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibayarkan pajaknya	26 unit	13 unit	13 unit		0 unit		13 unit		- unit	-	
5 2 03 04 01 0004	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pagar pembatas kecamatan dan tanah urug	2 Unit	2 Unit	1 gedung	79.991.400	2 Unit		2 Unit	79.991.400	- gedung	79.991.400	Usulan Penambahan anggaran untuk rehab pagar samping dan Tanah urug Rp.79.991.400
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	24 unit	24 unit	24 unit	5.750.00	24 unit	2.760.000	24 unit	28.410.000	24 unit	22.400.000	Usulan Penambahan anggaran untuk pemeliharaan meja kursi sebanyak 30 unit sebesar Rp. 2.400.000, pemeliharaan taman sebesar Rp. 20.000.000
7 01 02	PROGRAM PENYELEN GGARAAN PEMERINT AH DAN PELAYANA	Nilai Paten Kecamatan	88,4 5 nilai	88,50 nilai	88,55 nilai	1.811.00	0 nilai	400.000	85,6 nilai	1.811.00	- nilai	-	

	N PUBLIK													
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	200 persen	100 persen	100 persen	1.811.00	100 persen	400.000	100 persen	1.811.00	- persen	-		
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi	200 persen	100 persen	100 persen	1.811.00	100 persen	400.000	100 persen	1.811.00	- persen	-		
		Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi	200 persen	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		- persen	-		
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	200 persen	100 persen	100 persen	25.472.000	100 persen	2.311.000	100 persen	25.472.000	- persen	- 3.200.000		
		Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	200 persen	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		- persen	-		

7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeinahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	52 dokumen	26 dokumen	26 dokumen	25.472.000	26 dokumen	2.311.000	26 dokumen	25.472.000	- dokumen	-
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	52 laporan	26 laporan	26 laporan	25.472.000	26 laporan	2.311.000	26 laporan	25.472.000	- laporan	-
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	200 persen	100 persen	100 persen	12.182.000	50 persen	5.860.000	100 persen	123.982.400	- persen	111.800.000

		Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	52 lembaga	26 lembaga	26 lembaga		26 lembaga		26 lembaga		- lembaga	-	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	52 dokumen	26 dokumen	26 dokumen	15.211.000	13 dokumen	5.860.000	26 dokumen	123.982.400	- dokumen	111.800.000	
		Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	52 lembaga	26 lembaga	26 lembaga		26 lembaga		26 lembaga		- lembaga	-	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa	52 dokumen	26 dokumen	26 dokumen	15.211.000	13 dokumn	5.860.000	26 dokumen	123.982.400	- dokumen	111.800.000	Penambahan anggaran untuk acara pra musrenbangdes sebesar Rp. 11,800,000.00 Pameran UMKM Hari Jadi Jombang Rp. 100.000.000
		Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan	26 BUMDes	13 BUMDes	13 BUMDes		13 BUMDes		13 BUMDes		- BUMDes	-	
		Jumlah TP PKK yang dikoordinasikan	26 TP PKK	13 TP PKK	13 TP PKK		13 TP PKK		13 TP PKK		- TP PKK	-	

7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	200 persen	100 persen	100 persen	1.611.000	50 persen	700.000	100 persen	1.611.000	- persen	-	
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	24 laporan	12 laporan	12 laporan	1.611.000	6 laporan	700.000	12 laporan	1.611.000	- laporan	-	
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/S inergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	24 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	1.611.000	6 dokumen	700.000	12 dokumen	1.611.000	- dokumen	-	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH UMUM	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	200 persen	100 persen	100 persen	-	0 persen	-	100 persen	-	- persen	-	

		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100 persen	0 persen	100 persen		50 persen		100 persen		- persen	-	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	2 laporan	1 laporan	1 laporan	-	0 laporan	-	1 laporan		- laporan		
		Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	0 dokumen	4 dokumen		2 dokumen		4 dokumen		- dokumen	-	
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan	0 keg	0 keg	0 keg	-	0 keg	-	0 keg		- keg		
7 01 05 2.01 02	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam	4 laporan	0 laporan	4 laporan		2 laporan	-	4 laporan	1.811.000	- laporan	1.811.000	Penambahan anggaran dari sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa sebesar Rp. 1.811.000
						2.761.218.620		1.057.447.150		2.669.994.935		2.659.844.169	

BAB IV PENUTUP

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (RENJA SKPD) Kecamatan Ploso Tahun anggaran 2022, maka diharapkan dapat terwujud suatu pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan kinerja aparatur serta Pembangunan, khususnya pada kantor Kecamatan Ploso dalam kurun waktu tahun 2022 khususnya pada tribulan III dan IV.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tidak semata-mata dititik beratkan pada perencanaan yang strategis saja, namun perlu didukung dengan peningkatan kinerja aparatur. Untuk mewujudkan itu, maka semua komponen dapat memberikan kontribusi secara optimal dalam pembangunan Kecamatan Ploso melalui Pemberdayaan Masyarakat dan pelayanan prima sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

Selanjutnya perlu pula ditingkatkan koordinasi dengan instansi terkait serta Desa dalam wilayah kecamatan Ploso, sehingga makin memantapkan apa yang telah dicapai sekaligus dapat memenuhi harapan masyarakat.

Demikian Perubahan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Ploso Tahun anggaran 2022 yang dapat kami sampaikan, dengan harapan terwujudlah suatu kegiatan pembangunan yang berkesinambungan. Selanjutnya masukan-masukan, koreksi, kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan lebih lanjut.

Ploso, 29 Juni 2022

CAMAT PLOSO

